

ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR
KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2005-2011
*COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH BETWEEN DISTRICT/CITY RIAU PROVINCE
YEAR 2005-2011*

Yani Ramma Sani

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru

Abstrak

Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota membawa pengaruh terhadap tingkat pembangunan antar daerah yang menyebabkan penduduk terdorong untuk melakukan migrasi. Tujuan penelitian untuk mengklasifikasikan Kabupaten/Kota Provinsi Riau berdasarkan: Sektor basis dalam PDRB, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif dan teknik pengumpulan data dokumentasi laporan tahunan BPS Provinsi Riau. Analisis PDRB antara kabupaten / kota dengan menggunakan LQ rumus. Perbandingan analisis tingkat inflasi dan tingkat inflasi menggunakan rumus tingkat inflasi dan rumus tingkat pengangguran menggunakan rumus tingkat pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan, dilihat dari PDRB dengan MIGAS maka diketahui sektor pertanian: Kuansing, Inhu, Inhil, Pelalawan, Kampar dan Rohul. Sektor pertambangan dan penggalian: Siak, Bengkalis dan Rohil. Sektor industri pengolahan: Dumai. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran: Kepulauan Meranti, serta sektor listrik, gas dan air dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan: Pekanbaru. Dilihat dari PDRB non migas, sektor pertanian: Inhil, Pelalawan, Rohul dan Rokan Hilir. Sektor pertambangan dan penggalian: Kuansing dan Kampar. Sektor industri pengolahan: Siak dan Inhu. Perdagangan, hotel dan restoran: Kepulauan Meranti dan Bengkalis. Sektor pengangkutan dan komunikasi: Dumai, serta listrik, gas dan air bersih dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan: Pekanbaru. Tingkat inflasi yang terjadi besarnya di bawah 10 persen. Pengangguran laki-laki tertinggi dari Dumai rata-rata 12,24 persen per tahun, pengangguran wanita tertinggi berasal dari Rohil rata-rata 26,12 persen per tahun, dan pengangguran laki-laki dan perempuan tertinggi dari Dumai rata-rata 16,05 persen per tahun.

Abstract

Differences in economic growth between the District/City had an impact on the level of development between regions, which causes population compelled to migrate. Research purposes to classify the District/City Riau Province by: Sector base in GDP, inflation rate and the unemployment rate. Descriptive data analysis and quantitative data collection techniques documentation annual report BPS Riau Province. Analysis of GDP between districts/cities using the LQ formula. Comparative analysis of the inflation rate and the inflation rate and the inflation rate using the formula formula formula unemployment rate using the unemployment rate. The results show, seen from the Oil and Gas GDP with agriculture known: Kuansing, Inhu, Inhil, Pelalawan, Kampar and Rohul. Mining and quarrying sector: Siak, Bengkalis and Rokan Hilir. Manufacturing sector: Dumai. Sector Trade, hotels and restaurants: Meranti Islands, as well as electricity, gas and water and the financial sector, leasing and business services: Pekanbaru. Views of non-oil GDP, the agricultural sector: Inhil, Pelalawan, Rohul and Rokan Hilir. Mining and quarrying sector: Kuansing and Kampar. Manufacturing sector: Siak and Inhu. Trade, hotel and restaurant: Meranti Islands and Bengkalis. Transport and communications sector: Dumai, as well as electricity, gas and water supply and the financial sector, leasing and business services: Pekanbaru. The magnitude of the inflation rate below 10 percent. Highest male unemployment from Dumai average 12.24 percent per year, the highest

female unemployment comes from Rohil average 26.12 percent per year, and the unemployment of men and women from Dumai highest average 16.05 percent per year.

Keyword: Economic Growth, Gross Regional Domestic Bruto, Inflation Rate and Unemployment Rate

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Selain untuk menaikkan pendapatan nasional riil, tujuan pembangunan ekonomi juga untuk meningkatkan produktivitas masyarakatnya. Sehingga dengan adanya pembangunan ekonomi, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi makro jangka panjang, karena dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti: penambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Oleh sebab itu, untuk memberikan gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil.

Setiap daerah menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan kewajiban disatu sisi dalam menentukan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah dapat tumbuh cepat dan disisi lain mampu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayah menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya alam, penduduk, modal dan yang paling penting berpengaruh yaitu lokasi daerah dan struktur ekonomi regionalnya. Perbedaan pendapatan dan laju pertumbuhan perekonomian di daerah selain disebabkan oleh sumber daya alam juga disebabkan perbedaan jumlah pembangunan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah (Jhingan, 2007).

Kemajuan perekonomian suatu daerah menjadi tugas utama pemerintah pada daerah tersebut. Pakar ekonom menggunakan tiga variabel makro ekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. PDRB mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian yang disesuaikan dengan tingkat harga. Tingkat Inflasi (*Inflation rate*) mengukur seberapa cepat harga meningkat. Tingkat pengangguran (*unemployment rate*) mengukur bagian dari angkatan kerja yang belum kerja (Mankiw, 2003).

Untuk menyongsong Visi Provinsi Riau tahun 2020 “terwujudnya pembangunan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan, melalui kemudahan aksesibilitas, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara proporsional dalam rangka pemberdayaan”, maka diperlukan perencanaan makro ekonomi Provinsi Riau untuk tahun 2005-2011. Dalam perencanaan ekonomi makro akan menyorot indikator makro yang mempengaruhi perekonomian Provinsi Riau tujuh tahun kedepan, yaitu PDRB atas harga Konstan 2000.

Berikut gambaran PDRB atas harga konstan 2000 terlihat pada Tabel 1 (dilihat pada lampiran).

Selain itu, indikator lain yang perlu disorot dan diperhatikan adalah pertumbuhan PDRB Provinsi Riau tanpa Migas, hal ini dikarenakan ada beberapa Kabupaten/Kota yang sumbangan terbesar diperoleh dari sektor selain MIGAS. Gambaran mengenai PDRB Provinsi Riau tanpa Minyak dan Gas dapat terlihat pada Tabel 2 (dilihat pada lampiran).

Struktur pertumbuhan ekonomi Riau pada dasarnya didukung oleh sumber daya alam yang dimiliki seperti; migas, mineral, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Dengan potensi yang dimiliki dalam jumlah yang besar tersebut, maka pengelolaan yang efektif dan efisien akan memperkuat perekonomian Provinsi Riau. Perbedaan jumlah sumbangan Kabupaten/Kota dalam PDRB disebabkan oleh perbedaan sektor basis yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota. Selain Produk Domestik Regional Bruto untuk mengetahui kinerja perekonomian Provinsi Riau yaitu dengan melihat pergerakan inflasi yang terjadi selama Periode tahun 2005-2011, dimana Inflasi diidentikkan atau diartikan dengan naiknya harga-harga di pasaran yang membuat masyarakat resah. Ironisnya pemicu terbesar terjadinya Inflasi pada tahun 2005 yang mencapai 17,1 Persen adalah adanya kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah dengan menaikkan harga bahan baku yang cukup signifikan. Disamping itu penyebab lainnya; hari raya keagamaan, bencana alam, kondisi sosial, politik, keamanan, dan lain-lain (Mankiw, 2003).

Indikator selanjutnya untuk mengukur perekonomian yaitu tingkat pengangguran, karena pengangguran dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Jumlah penduduk yang besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Jika pertumbuhan perekonomian tidak lancar, maka jumlah orang yang tidak tertampung di dalam suatu pekerjaan akan semakin besar. Sebaliknya, bila suatu perekonomian dalam keadaan makmur maka makin kecil jumlah orang yang menganggur (Mankiw, 2003).

Selain Produk Domestik Regional Bruto untuk mengetahui kinerja perekonomian Provinsi Riau yaitu dengan melihat pergerakan inflasi yang terjadi selama Periode tahun 2005-2011, dimana Inflasi diidentikkan atau diartikan dengan naiknya harga-harga di pasaran yang membuat masyarakat resah. Ironisnya pemicu terbesar terjadinya Inflasi pada tahun 2005 yang mencapai 17,1 Persen adalah adanya kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah dengan menaikkan harga bahan baku yang cukup signifikan. Disamping itu penyebab lainnya; hari raya keagamaan, bencana alam, kondisi sosial, politik, keamanan, dan lain-lain (Mankiw, 2003).

Indikator selanjutnya untuk mengukur perekonomian yaitu tingkat pengangguran, karena pengangguran dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Jumlah penduduk yang besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Jika pertumbuhan perekonomian tidak lancar, maka jumlah orang yang tidak tertampung di dalam suatu pekerjaan akan semakin besar. Sebaliknya, bila suatu perekonomian dalam keadaan makmur maka makin kecil jumlah orang yang menganggur (Mankiw, 2003).

Dari berbagai fakta mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau diketahui bahwa setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antar kabupaten yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, membawa pengaruh terhadap tingkat pembangunan antar daerah. Ketimpangan tingkat pembangunan antar daerah menyebabkan penduduk terdorong atau tertarik untuk melakukan pergerakan dari satu daerah ke daerah lainnya atau dengan kata lain penduduk melakukan migrasi. Ketertinggalan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya masih disebabkan belum digunakannya secara optimal sumber daya yang ada di daerah tersebut dan masih minimnya sarana dan prasarana yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Dengan kata lain bahwa masyarakat atau daerah yang memiliki faktor produksi yang rendah kurang mendapat kesempatan sehingga tidak mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari perbedaan dalam distribusi pendapatan yang cukup besar.

Penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan Kabupaten/Kota Provinsi Riau berdasarkan sektor basis dalam Produk Domestik Regional Bruto, tingkat inflasi yang terjadi dan tingkat pengangguran yang ada. Perbedaan sektor basis yang dimiliki setiap daerah menjadi salah satu faktor perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Tidak hanya perbedaan di sektor basis saja yang menjadi faktor utama, tetapi tingkat Inflasi dan juga tingkat pengangguran juga menjadi faktor penentu tingkat pertumbuhan ekonomi. Inflasi mengukur seberapa laju kenaikan harga dan tingkat pengangguran mengukur seberapa besar TPAK yang belum bekerja atau menganggur di suatu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dimana perbedaan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

2. Metode Penelitian

Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi (*Inflation Rate*), dan Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau di Pekanbaru.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah berbentuk data kuantitatif dengan jenis data ratio yaitu jenis data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika yang memiliki nol mutlak (nol sesungguhnya).

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) yang bersifat *time series*, dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya telah didokumentasikan oleh instansi/perusahaan (Almasdi Syahza, 2009). Data tersebut terdiri dari satu variabel yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tiga indikator yaitu PDRB, tingkat inflasi (*inflation rate*) dan tingkat pengangguran (*unemployment rate*).

Teknik Pengumpulan Data

Karena data yang digunakan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data serta informasi yang dianggap perlu yang diperoleh dari laporan tahunan BPS Provinsi Riau berbagai edisi yang berkedudukan di Kota Pekanbaru serta data-data yang diperoleh dari media masa, internet, tinjauan kepustakaan dan publikasi lain yang dapat membantu penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu menguraikan permasalahan secara umum dan membahas data-data yang telah ada dan menghubungkan dengan keadaan yang sebenarnya. Sesuai dengan namanya, deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan pertumbuhan ekonomi yang telah dibuat melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kemudahan untuk ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi mengenai penelitian ini.

- **PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

Untuk menganalisis perbandingan besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu wilayah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional terhadap PDRB digunakan rumus *Location Quotient* (Koefisien Lokasi) atau disingkat LQ. Adapun besaran LQ dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{S_i}{N_i} : \frac{S}{N}$$

Dimana:

S_i = Jumlah PDRB sektor i di masing-masing Kabupaten/Kota

S = Jumlah total PDRB di masing-masing Kabupaten/Kota

N_i = Jumlah PDRB sektor i di Provinsi Riau

N = Jumlah total PDRB di Provinsi Riau

- **Tingkat Inflasi (*Inflation Rate*)**

Untuk menganalisis perbandingan tingkat inflasi maka digunakan rumus tingkat inflasi. Adapun besaran tingkat inflasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2004):

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK - IHK_1}{IHK_1} \times 100$$

Dimana:

IHK = Indeks Harga Konsumen pada tahun tertentu

IHK_1 = Indeks Harga Konsumen pada tahun sebelumnya

- **Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*)**

Sedangkan untuk menganalisis perbandingan tingkat pengangguran maka menggunakan rumus tingkat pengangguran. Besaran tingkat pengangguran dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2004):

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Operasional Variabel

Untuk mempermudah mengartikan apa yang menjadi objek dari penelitian, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Ekonomi** adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat yang terjadi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang akan diteliti adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten-kabupaten dan kota di Provinsi Riau dari tahun 2005 sampai tahun 2011.

- **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** yang akan diteliti yaitu menggunakan data dari tahun 2005 sampai tahun 2011 berdasarkan faktor-faktor produksi yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan satuan alat ukur mata uang rupiah.

- **Tingkat Inflasi** yang akan diteliti adalah tingkat inflasi yang terjadi di Kota yang ada di Provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai dari tahun 2005 sampai tahun 2011.

- **Tingkat Pengangguran** yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran dari tahun 2005 sampai 2011.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Perbandingan PDRB antar Kabupaten/Kota

Untuk LQ berdasarkan PDRB dengan dan tanpa MIGAS setelah dilakukan perhitungan dan penelitian maka dapat dilihat perbandingan PDRB antar Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2005-2011 berdasarkan LQ. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat sektor basis masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Setelah dilakukan analisis dengan menghitung besar LQ nya, maka diperoleh angka LQ dan basis masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Riau seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sektor basis antar Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2005-2011

Kabupaten/Kota	Ttahun													
	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	dengan MIGAS	tanpa MIGAS	dengan MIGAS	tanpa MIGAS	dengan MIGAS	tanpa MIGAS	dengan MIGAS	tanpa MIGAS	dengan MIGAS	tanpa MIGAS	dengan MIGAS	tanpa MIGAS	dengan MIGAS	tanpa MIGAS
Kuansing	Pertanian (3,34)	pertambangan dan penggalian (6,10)	Pertanian (3,30)	pertambangan dan penggalian (6,75)	Pertanian (3,17)	pertambangan dan penggalian (6,52)	Pertanian (3,13)	pertambangan dan penggalian (6,52)	Pertanian (3,09)	pertambangan dan penggalian (6,10)	Pertanian (3,08)	pertambangan dan penggalian (5,72)	Pertanian (3,10)	pertambangan dan penggalian (5,32)
Inhu	pertanian 92,81)	pertanian (1,27)	pertanian (2,72)	pertanian (1,27)	pertanian (2,62)	pertanian dan industri pengolahan(1,27)	pertanian (2,56)	industri pengolahan (1,31)	pertanian (2,45)	industri pengolahan (1,36)	pertanian (2,41)	industri pengolahan (1,39)	pertanian (2,37)	industri pengolahan (1,41)
Inhil	pertanian (2,95)	pertanian (1,25)	pertanian (2,88)	pertanian (1,26)	pertanian (2,78)	pertanian (1,27)	pertanian (2,75)	pertanian (1,29)	pertanian (2,69)	pertanian (1,30)	pertanian (2,65)	pertanian (1,32)	pertanian (2,64)	pertanian (1,34)
Pelalawan	pertanian (3,22)	pertanian (1,44)	pertanian (3,16)	pertanian (1,46)	pertanian (3,09)	industri pengolahan (1,65)	pertanian (3,05)	industri dan pengolahan (1,67)	pertanian (2,93)	industri pengolahan (1,72)	pertanian (2,90)	pertanian (1,52)	pertanian (2,89)	pertanian (1,55)
Siak	pertambangan dan penggalian (1,47)	industri pengolahan (3,09)	pertambangan dan penggalian (1,49)	industri pengolahan (3,08)	pertambangan dan penggalian (1,51)	industri pengolahan (3,01)	pertambangan dan penggalian (1,53)	industri pengolahan (2,95)	pertambangan dan penggalian (1,53)	industri pengolahan (2,92)	pertambangan dan penggalian (1,48)	industri pengolahan (2,92)	pertambangan dan penggalian (1,47)	industri pengolahan (2,89)
Kampar	pertanian (1,62)	pertambangan dan penggalian (3,45)	pertanian (1,64)	pertambangan dan penggalian (3,08)	pertanian (1,67)	pertambangan dan penggalian (2,82)	pertanian (1,69)	pertambangan dan penggalian (2,72)	pertanian (1,65)	pertambangan dan penggalian (2,67)	pertanian (1,70)	pertambangan dan penggalian (2,72)	pertanian (1,70)	pertambangan dan penggalian (2,78)
Rohul	pertanian (3,22)	pertanian (1,48)	pertanian (3,17)	pertanian (1,50)	pertanian (3,10)	pertanian (1,53)	pertanian (3,10)	pertanian (1,56)	pertanian (3,06)	pertanian (1,60)	pertanian (3,08)	pertanian (1,62)	pertanian (3,05)	pertanian (1,66)
Bengkalis	pertambangan dan penggalian (1,51)	perdagangan, hotel dan restoran (1,79)	pertambangan dan penggalian (1,53)	perdagangan, hotel dan restoran (1,70)	pertambangan dan penggalian (1,63)	perdagangan, hotel dan restoran (1,79)	pertambangan dan penggalian (1,65)	perdagangan, hotel dan restoran (1,77)	pertambangan dan penggalian (1,68)	perdagangan, hotel dan restoran (1,75)	pertambangan dan penggalian (1,74)	listrik, gas dan air bersih (1,88)	pertambangan dan penggalian (1,79)	listrik, gas dan air bersih (1,94)
Rohil	pertambangan dan penggalian (1,31)	pertanian (1,42)	pertambangan dan penggalian (1,31)	pertanian (1,44)	pertambangan dan penggalian (1,33)	pertanian (1,47)	pertambangan dan penggalian (1,33)	pertanian (1,50)	pertambangan dan penggalian (1,34)	pertanian (1,52)	pertambangan dan penggalian (1,32)	pertanian (1,55)	pertambangan dan penggalian (1,30)	pertanian (1,58)
Kep.Meranti	perdagangan, hotel dan restoran (2,08)	perdagangan, hotel dan restoran (1,70)	perdagangan, hotel dan restoran (2,02)	perdagangan, hotel dan restoran (1,68)	perdagangan, hotel dan restoran (2,01)	perdagangan, hotel dan restoran (1,68)	perdagangan, hotel dan restoran (1,99)	perdagangan, hotel dan restoran (1,67)	perdagangan, hotel dan restoran (2,11)	perdagangan, hotel dan restoran (1,66)	perdagangan, hotel dan restoran (2,18)	perdagangan, hotel dan restoran (1,63)	perdagangan, hotel dan restoran (2,18)	perdagangan, hotel dan restoran (1,63)
Dumai	industri pengolahan (5,57)	pengangkutan dan komunikasi (3,69)	industri pengolahan (5,29)	pengangkutan dan komunikasi (3,61)	industri pengolahan (4,95)	pengangkutan dan komunikasi (3,63)	industri pengolahan (4,74)	pengangkutan dan komunikasi (3,55)	industri pengolahan (4,41)	pengangkutan dan komunikasi (3,49)	industri pengolahan (4,11)	pengangkutan dan komunikasi (3,42)	industri pengolahan (3,89)	pengangkutan dan komunikasi (3,38)
Pekanbaru	listrik, gas dan air bersih (6,33)	listrik, gas dan air bersih (2,68)	listrik, gas dan air bersih dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (6,06)	listrik, gas dan air bersih dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,65)	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (6,33)	keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,63)	listrik, gas dan air bersih (5,47)	listrik, gas dan air bersih (2,56)	listrik, gas dan air bersih (5,30)	listrik, gas dan air bersih (2,56)	listrik, gas dan air bersih (5,06)	listrik, gas dan air bersih (2,52)	keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (4,82)	keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,460)

Analisis Perbandingan Tingkat Inflasi

Untuk tingkat inflasi setelah dilakukan penelitian ternyata untuk Provinsi Riau sejak tahun 2005 hanya ada dua Kota yang dapat dilakukan penghitungan inflasinya pasca pemekaran Kepulauan Riau yaitu hanya Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Hal ini dikarenakan dalam penghitungan inflasi yang paling berperan penting adalah adanya Indeks Harga Konsumen.

Oleh karena itu data yang tersedia di BPS Provinsi Riau hanya menggambarkan seberapa cepat IHK kedua Kota tersebut berkembang, dan khususnya untuk Kota Dumai penghitungan IHK mulai dapat dihitung sejak tahun 2008, jadi penghitungan tingkat inflasi untuk Kota Dumai dimulai dari tahun 2009. Sehingga Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang menjadi acuan dari besarnya tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Riau dalam mempengaruhi perekonomian secara nasional.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan tingkat inflasi Provinsi Riau dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pertumbuhan Tingkat Inflasi Provinsi Riau tahun 2005-2011 (%)

Komoditas	Kota Pekanbaru							Kota Dumai		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Bahan Makanan	21,22	10,34	8,01	-24,88	1,19	13,55	6,01	0,60	19,12	0,69
Makanan jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	11,19	4,88	11,95	-23,38	5,53	5,28	5,88	3,20	9,37	5,07
Perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar	7,58	4,78	5,43	-37,83	1,77	6,01	3,48	0,50	7,09	3,79
Sandang	6,46	8,42	14,45	-26,04	5,87	6,83	6,33	4,02	5,83	10,68
Kesehatan	9,40	13,75	5,72	-30,68	4,82	1,90	7,10	2,27	1,24	3,49
Pendidikan, Rekreasi & olahraga	13,73	2,93	4,44	-29,01	3,19	6,98	7,19	2,74	3,26	5,92
Transpor, komunikasi & jasa keuangan	52,39	0,60	1,38	-39,93	-3,91	1,87	2,73	-1,95	-0,23	0,34
IHK Umum	17,10	6,32	7,53	-30,95	1,94	7,00	5,09	0,80	9,05	3,09

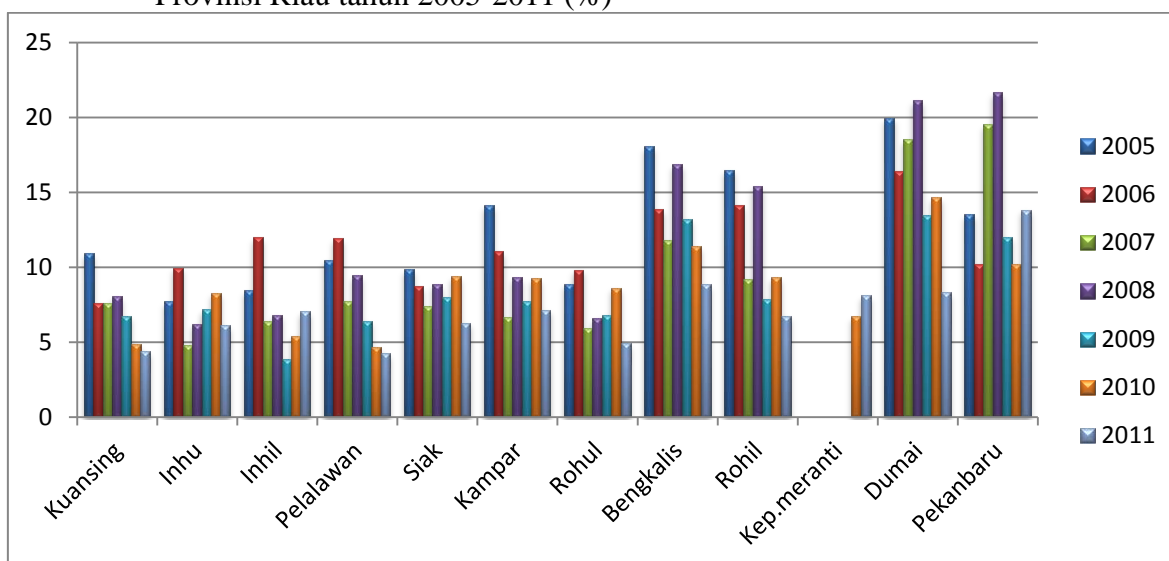
Sumber: Data olahan

Analisis Perbandingan Tingkat Pengangguran

Dengan menggunakan rumus tingkat pengangguran maka dapat dilihat perbandingan jumlah pengangguran antar Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2005-2011. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat seberapa besar perekonomian dapat menampung jumlah angkatan kerja yang tersedia.

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan rumus tingkat pengangguran, maka diperoleh angka pengangguran untuk masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Riau seperti yang terdapat dalam grafik 1.

Grafik 1. Tingkat Pengangguran penduduk laki-laki dan perempuan antar Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2005-2011 (%)



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PDRB

a. Dengan melihat LQ PDRB dengan MIGAS maka dapat dikelompokkan Kabupaten/Kota berdasarkan sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan untuk enam Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan untuk tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan Kota Dumai. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti serta sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor basis Kota Pekanbaru.

b. Bila melihat LQ PDRB tanpa MIGAS dapat dikelompokkan beberapa Kabupaten/Kota sesuai sektor unggulannya. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan untuk empat Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar. Sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan untuk dua Kabupaten yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor basis dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis. Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor basis Kota Dumai serta sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menjadi sektor basis Kota Pekanbaru.

2. Tingkat Inflasi

Dilihat dari tingkat inflasi maka dapat disimpulkan bahwa inflasi yang terjadi pada tahun 2005 sampai tahun 2011 di Provinsi Riau khususnya di Kota Dumai dan di Kota Pekanbaru merupakan tingkat inflasi dalam kategori ringan yaitu masih dibawah 10 persen. Hal tersebut merupakan suatu gejala ekonomi yang wajar karena masih mudah dikendalikan. Harga-harga secara umum mengalami kenaikan, namun tidak menyebabkan krisis ekonomi.

3. Tingkat Pengangguran

Bila dilihat dari tingkat pengangguran tahun 2005-2011 antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau maka dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran penduduk laki-laki tertinggi yaitu berasal dari Kota Dumai yang rata-rata sebesar 12,24 persen per tahun. Sedangkan tingkat pengangguran penduduk perempuan tertinggi berasal dari Kabupaten Rokan Hilir yang rata-rata 26,12 persen per tahun, serta tingkat pengangguran penduduk laki-laki dan perempuan tertinggi yaitu berasal dari Kota Dumai yang rata-rata 16,05 persen per tahunnya.

Saran-saran

1. Kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Riau hendaknya lebih diprioritaskan kepada nilai LQ masing-masing sektor basis seperti sektor pertanian merupakan sektor unggulan untuk enam Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan untuk tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan Kota Dumai. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti serta sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor basis Kota Pekanbaru. Untuk menunjang percepatan pembangunan di Kabupaten/kota Provinsi Riau, maka peranan sektor basis lebih diutamakan dan ditingkatkan kearah yang lebih baik sehingga dapat menunjang pertumbuhan sektor non basis.
2. Untuk mengatasi tingkat inflasi maka diperlukan peranan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah inflasi yang terjadi di Provinsi Riau khususnya di Kota Dumai dan kota Pekanbaru, sehingga inflasi yang terjadi dapat diatasi dengan kebijakan moneter, kebijakan non moneter maupun kebijakan-kebijakan lainnya.
3. Demi kelancaran proses pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, maka diperlukan lapangan pekerjaan yang seimbang dengan jumlah angkatan kerja sehingga dapat memperkecil ruang penciptaan pengangguran. Selain itu, peningkatan mutu tenaga kerja tidak hanya dari pengalaman tapi juga harus diimbangi dengan pendidikan yang memadai sehingga mampu tercipta mutu angkatan kerja yang memiliki skill dan keterampilan yang dapat dijadikan dasar dalam persaingan dipasar tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti. 2008. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2008: 44 - 55 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Almasdi Syahza. 2000. *Studi Pengembangan Buah-buahan Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis di Kabupaten Kampar, LPIU – Due Project Universitas Riau*. Pekanbaru: PPKPEM
- _____. 2009. *Buku Ajar: Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- _____. 2012. *Ekonomi Pembangunan Teori dan Kajian Empirik Pembangunan Pedesaan*. Pekanbaru: UR PRESS Pekanbaru
- Arifin Shamsul. 2008. *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur*. Jakarta: Alex Media.

- BPS Provinsi Riau. 2011. *Riau In figures 2011*. Pekanbaru: Biro Pusat Statistik Provinsi Riau.
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mankiw N Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Pribadi Setiyanto dan Ayudha D. Prayogo. 2012. *Ekonomi kelas X Semester 2*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Robinson Tarigan. 2007. *Ekonomi Regional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sadono Sukirno. 2004. *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siti Hasanah Lubis. 2010. *Analisis Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2004-2008*. Skripsi Sarjana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Sri Mulyani. 2010. *Kabupaten dan Kota di Provinsi di Riau*. (On-Line) <http://pengetahuan-oemum.blogspot.com/2010/11/kabupaten-dan-kota-di-provinsi-riau.html>. Diakses 23 Desember 2012

Lampiran:

Tabel 1. PDRB antar Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2005-2011 Berdasarkan Lapangan Usaha dengan MIGAS (jutaan Rupiah) dan Kontribusinya (%)

Kab/ Kota	PDRB (jutaan Rp) dan kontribusinya (%)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kuansing	2.119.091,21 2,63 %	2.306.236,82 2,73%	2.511.608,96 2,94%	2.718.998,77 3,02%	2.906.642,12 3,13%	3.110.873,14 3,20%	3.334.563,52 3,24%
Inhu	3.030.169,59 3,76%	3.245.331,27 3,84%	3.469.108,22 4,07%	3.722.816,19 4,13%	3.992.652,96 4,30%	4.219.927,27 4,35%	4.534.022,79 4,40%
Inhil	4.654.045,18 5,78%	5.023.420,87 5,94%	5.416.154,25 6,35%	5.846.659,07 6,49%	6.263.845,94 6,74%	6.721.930,59 6,93%	7.218.165,93 7,02%
Pelalawan	2.325.917,36 2,89%	2.500.942,71 2,96%	2.670.775,22 3,13%	2.856.946,95 3,17%	3.088.453,01 3,32%	3.295.731,30 3,4%	3.520.698,36 3,42%
Siak	14.028.230,35 17,43%	14.567.279,29 17,23%	14.748.096,91 17,28%	15.416.737,55 17,11%	14.994.010,58 16,13%	13.672.500,97 14,10%	13.639.825,84 13,3%
Kampar	7.251.647,68 9,01%	7.563.362,66 8,94%	7.827.594,75 9,17%	8.279.263,32 9,19%	8.893.546,27 9,57%	9.163.309,15 9,45%	9.730.412,77 9,45%
Rohul	1.995.598,46 2,48%	2.132.572,02 2,52%	2.271.851,09 2,66%	2.426.330,44 2,69%	2.570.658,39 2,77%	2.706.742,43 2,8%	2.948.658,93 2,87%
Bengkalis	24.222.298,89 30,09%	25.161.093,53 29,75%	23.220.747,96 27,21%	24.189.484,25 26,84%	24.661.248,13 26,54%	27.792.359,49 28,66%	30.398.393,99 29,54%
Rohil	10.201.672,10 13%	10.581.305,84 13%	10.796.848,05 12,65%	11.336.110,22 13%	11.535.106,96 12%	11.385.109,63 11,75%	11.521.883,60 11,19%
Kep. Meranti	1.926.243,35 2,39%	2.029.502,82 2,40%	2.107.163,74 2,47%	2.227.328,59 2,47%	2.150.883,83 2,31%	2.135.115,18 2,20%	2.261.693,67 2,19%
Dumai	2.958.220,29 3,68%	3.091.001,17 3,65%	3.303.147,41 3,87%	3.474.178,79 3,85%	3.569.437,83 3,84%	3.715.931,20 3,83%	3.901.773,47 3,79%
Pekanbaru	5.780.933,15 7,18%	6.367.596,81 7,53%	6.997.154,88 8,2%	7.630.422,50 8,47%	8.302.631,95 8,93%	9.047.929,45 9,33%	9.866.360,31 9,59%
Riau	80.494.067,61 100%	84.569.645,81 100%	85.340.251,44 100%	90.125.276,64 100%	92.929.117,97 100%	96.967.459,80 100%	102.876.453,18 100%

Sumber: Diolah dari data Riau dalam Angka 2008 dan 2012

Tabel 2. PDRB antar Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2005-2011 Berdasarkan Lapangan Usaha tanpa MIGAS (jutaan Rupiah) dan Kontribusinya (%)

Kab/ Kota	PDRB (jutaan Rp) dan kontribusinya (%)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kuansing	2.119.091,21 6,25%	2.306.236,82 6,29%	2.511.608,96 6,51%	2.718.998,77 6,53%	2.906.642,12 6,50%	3.110.873,14 6,47%	3.334.563,52 6,43%
Inhu	2.838.555,94 8,38%	3.048.922,04 8,31%	3.273.425,99 8,5%	3.519.854,16 8,45%	3.765.967,30 8,42%	4.029.902,37 8,4%	4.320.329,72 8,33%
Inhil	4.654.045,18 13,74%	5.023.420,87 13,70%	5.416.154,25 14,05%	5.846.659,07 14,04%	6.263.845,94 14,01%	6.721.930,59 13,97%	7.218.165,93 13,92%
Pelalawan	2.196.604,60 6,48%	2.364.959,37 6,45%	2.535.295,21 6,58%	2.716.426,80 6,52%	2.907.109,82 6,50%	3.120.718,91 6,49%	3.340.762,87 6,44%
Siak	2.649.295,89 7,82%	2.856.485,73 7,79%	3.080.650,16 7,99%	3.315.236,95 7,96%	3.552.361,36 7,95%	3.813.903,94 7,93%	4.098.330,57 7,90%
Kampar	3.244.049,34 9,58%	3.494.275,32 9,53%	3.773.568,90 9,79%	4.074.419,07 9,79%	4.353.918,17 9,74%	4.661.065,93 9,7%	4.989.165,06 9,62%
Rohul	1.835.688,00 5,42%	1.968.335,24 5,37%	2.108.279,08 5,47%	2.257.614,23 5,42%	2.387.915,73 5,34%	2.561.909,73 5,32%	2.756.633,95 5,32%
Bengkalis	3.357.914,48 9,91%	3.616.074,44 9,86%	2.760.497,53 7,11%	2.980.469,97 7,16%	3.191.886,96 7,14%	3.419.687,00 7,10%	3.681.835,09 7,10%
Rohil	2.834.067,78 8,36%	3.062.829,50 8,35%	3.306.200,91 8,58%	3.566.795,06 8,57%	3.825.664,73 8,56%	4.115.430,35 8,55%	4.431.296,21 8,55%
Kep. Meranti	1.000.340,53 2,95%	1.073.104,97 2,93%	1.154.305,94 2,99%	1.239.022,46 2,98%	1.320.714,36 2,95%	1.419.067,34 2,94%	1.539.027,89 3%
Dumai	1.369.816,86 4,04%	1.497.773,76 4,08%	1.630.667,13 4,23%	1.771.906,27 4,26%	1.921.293,70 4,30%	2.086.575,92 4,33%	2.259.968,46 4,36%
Pekanbaru	5.780.933,15 17,06%	6.367.596,81 17,36%	6.997.154,88 18,15%	7.630.422,50 18,32%	8.302.631,95 18,57%	9.047.929,45 18,80%	9.866.360,31 19,03%
Riau	33.880.402,96 100%	36.680.014,87 100%	38.547.808,94 100%	41.637.825,51 100%	44.699.952,14 100%	48.108.994,67 100%	51.836.439,58 100%

Sumber: Diolah dari data Riau dalam Angka 2008 dan 2012

